

**PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP TERGUGAT  
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ) YANG TIDAK  
MELAPORKAN PERCERAIANNYA BERDASARKAN PASAL 7  
PERATURAN PEMERINTAH No.53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN  
PNS**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ASTIKA RAHMA YUSTISIA**

**NIM. 0910110120**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP TERGUGAT  
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ) YANG TIDAK  
MELAPORKAN PERCERAIANNYA BERDASARKAN PASAL 7  
PERATURAN PEMERINTAH No.53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN  
PNS**

Astika Rahma Yustisia

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: [astikayustisia@yahoo.com](mailto:astikayustisia@yahoo.com)

**ABSTRAK**

ASTIKA RAHMA YUSTISIA. Hukum Perdata. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Februari 2013. *Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang Tidak Melaporkan Perceraian Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS*. Ulfa Azizah, S.H. MKn ; Lutfi Effendi, SH. M. Hum

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengajukan perceraian wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh surat keterangan tersebut harus mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, kemudian barulah mengajukan gugatan kepada Pengadilan setempat. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat , wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh surat keterangan selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian. Namun saat ini masih terjadi kasus mengenai PNS yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai bahkan sampai pada proses perceraian berakhir. Timbulnya kasus perceraian PNS namun tidak melaporkan bahkan tidak memperoleh ijin perceraian dari pejabat atau atasan menjadikan pejabat lebih tegas dalam menerapkan hukuman apabila terjadi pelanggaran . Hukuman yang diberikan adalah Hukuman Disiplin yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS .

Kata Kunci : Pelaksanaan , Hukuman Disiplin , Tergugat PNS, Perceraian

ASTIKA RAHMA YUSTISIA. *Civil Law. UB Law School. February 2013. Implementation status Disciplinary Against Defendants Civil Servants (PNS) were not Report divorce Under Article 7 of Regulation 53 Year 2010 on Discipline PNS*. Ulfa Azizah, SH MKn; Lutfi Effendi, SH. M. Hum

*Civil Servants (PNS) that will be required to obtain a divorce certificate in advance of the official. For civil servants who serves as a defendant to obtain a certificate must submit a request in writing in accordance with Article 3, paragraph 1 and paragraph 2 of Government Regulation No. 45 Year 1990 on the*

*Amendment Regulation Number 10 of 1983 on Marriage and Divorce license for civil servants. Having obtained written permission, and then then filed a lawsuit against the local court. For civil servants who serves as the defendant, shall notify in writing any claims of a husband or wife to the authorities to obtain a certificate no later than six days after he received the divorce suit. But it is still going on about civil cases are not reported to the divorce even divorce proceedings to an end. The emergence of civil divorce case, but did not report did not even get a permit divorce from superior officers or officials make more assertive in applying penalties in case of violations. Punishment is Disciplinary set forth in Article 7 of Regulation 53 Year 2010 on Discipline PNS.*

*Keyword :Implementation, Disciplinary, Defendants civil servants, Divorce*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, maka seharusnya dapat menghindari perceraian dalam ikatan perkawinan tersebut. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sebagai aparatur negara dan abdi Negara harus dapat menjadi contoh teladan yang baik dalam tindakan, tingkah laku, dan ketaatan atas peraturan perundangan bagi masyarakat. PNS dalam melangsungkan perkawinan tidak seperti perkawinan pada masyarakat umum,

melainkan perlu memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan oleh peraturan perundangan, begitu juga dengan PNS yang akan melakukan perceraian harus dapat memenuhi syarat-syarat administratif tersebut. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat dan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh surat keterangan, selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar dan tidak dapat mentaati peraturan PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin PNS berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Khususnya dalam hal ini mengenai permohonan ijin perceraian dan pemberitahuan tentang adanya gugatan cerai yang tidak dilaporkan oleh PNS kepada pejabat berwenang. Kasus mengenai PNS yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai bahkan sampai pada proses perceraian berakhir banyak terjadi pada lembaga kepegawaian saat ini. Angka perceraian PNS di Kabupaten Kediri cukup tinggi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 24 kasus perceraian PNS. Dari 24 kasus tersebut terdapat 4 kasus perceraian PNS yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai dan tidak memiliki Ijin perceraian. Timbulnya kasus perceraian PNS namun tidak melaporkan bahkan tidak memperoleh ijin perceraian dari pejabat atau atasan menjadikan pejabat lebih tegas dalam menerapkan hukuman apabila terjadi pelanggaran.

Hukuman yang diberikan adalah Hukuman Disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Pemberian hukuman disiplin kepada PNS yang tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat akan menimbulkan akibat hukum bagi PNS tersebut dan akan menimbulkan upaya hukum yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Salah satu kasus perceraian PNS tanpa memperoleh ijin pejabat yang terjadi pada seorang PNS di kabupaten Kediri<sup>1</sup> bernama X dengan jabatan pangkat Penata gol.III/e yang berkedudukan sebagai tergugat. X telah melakukan perceraian dengan istrinya saudari Y ( Penggugat ) tanpa memperoleh Surat Keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebagaimana Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0554/AC/2011/PA/Kab.Kdr tanggal 2 Maret 2011. Diketahui bahwa proses perceraian dari awal sampai dengan akhir dilaksanakan oleh pihak pengacara saudari Y sehingga saudara X tidak mengikuti proses tersebut. Saudara X juga tidak melaporkan adanya gugatan cerai dari pihak istri kepada pejabat dikarenakan adanya kesepakatan dengan mantan istri yaitu saudari Y bahwa segala sesuatu yang terkait dengan proses perceraian baik keuangan maupun administratif akan diurus oleh mantan istri dan pengacaranya sehingga ia tidak perlu meminta ijin dan memproses urusan perceraian. Kasus serupa terjadi pada tergugat dengan status PNS bernama A dan penggugat B tanpa memperoleh Surat Keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebagaimana Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor:

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

2489/AC/2011/PA.Kab.Kediri. Diketahui bahwa pihak A sebagai tergugat telah bercerai dan mengetahui telah digugat cerai oleh istrinya dan telah mendapatkan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebelum mendapatkan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada tergugat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaporkan perceraianya berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS ?
2. Bagaimana akibat hukum dan upaya dari pelaksanaan hukuman disiplin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraianya kepada pejabat ?

## **C. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yaitu di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah pelaksanaan pemberian hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraianya kepada pejabat berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu wawancara dengan tokoh yang dapat memberikan penjelasan tentang permasalahan dan berkaitan dengan permasalahan yaitu pihak panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Letak Geografis Kabupaten Kediri adalah antara  $111^{\circ}47'05''$  sampai dengan  $112^{\circ}18'20''$  Bujur Timur ( BT ) dan  $7^{\circ}36'12''$  sampai dengan  $8^{\circ}0'32''$  Lintang Selatan ( LS ) dengan luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kediri yaitu 1.386,05 km<sup>2</sup> atau 138 605 ha, terdiri dari lahan sawah 47.306 hektar dan lahan non sawah 91.299 hektar, namun luas lahan sawah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, Tahun 2011 turun cukup drastis yakni 140ha dari tahun 2010 sehingga kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar kebutuhan pangan tetap terjaga . Batas-batas wilayah kabupaten Kediri meliputi : sebelah utara berbatasan

dengan daerah Tk.II Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk, sebelah selatan berbatasan dengan daerah Tk.II Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung, sebelah timur berbatasan dengan daerah Tk.II Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang, serta sebelah barat berbatasan dengan daerah Tk.II Kabupaten Nganjuk dan kabupaten Tulungagung<sup>2</sup>. Kondisi topografi terdiri dari dataran rendah 36 pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Pada tahun 2011 tingkat curah hujan rata-rata sekitar 15,81 mm per hari, lebih rendah dari tahun 2010 yang mencapai 16,76 mm per hari<sup>3</sup>. Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki 419 institusi yang terdiri dari 17 Dinas, 6 Badan, 4 Kantor, 8 Bagian ( Sekretariat ), 4 BUMD, 1 KPUD, 1 staf ahli Bupati, 1 RSUD, 1 Satpol PP, 1 Sekwan, 1 Inspektorat, 26 Kecamatan, 343 Desa, dan 1 Kelurahan. Jumlah organisasi RW dan RT masing-masing ada sebanyak 2.812 RW dan 9.265 RT. Pada tahun 2011 terjadi penambahan 21 RT, akan tetapi jumlah RW menurun 36 RW<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kabupaten Kediri Dalam Angka, **Kabupaten Kediri Dalam Angka 2011**, Kediri, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2012, hal lxiii.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kabupaten Kediri Dalam Angka, *ibid*, hal lxiii.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kabupaten Kediri Dalam Angka, *ibid*, hal lxiii.



2. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Bertatus Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaporkan Perceraian Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

Gambaran dan analisis kasus

Posisi Kasus I :

Salah satu kasus perceraian PNS yang tidak melaporkan perceraian kepada pejabat bahkan tidak memperoleh izin dari pejabat terjadi pada seorang PNS di kabupaten Kediri. Kasus tersebut terjadi pada seorang PNS bernama X dengan jabatan pangkat Penata gol.III/e dengan pangkat Kasubag. Pengendalian Program Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai tergugat . Tergugat telah melakukan perceraian dengan istrinya saudari Y ( Penggugat ) , tanpa memperoleh Surat Keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebagaimana Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 0554/AC/2011/PA/Kab.Kdr tanggal 2 Maret 2011<sup>5</sup>. Pada tanggal 19 Juli 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 8 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak . Namun sekitar tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak terdapat harapan akan hidup rukun lagi .

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

Pada persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Kuasa dari Penggugat dan Pengugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut. Tergugat juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya dengan disebabkan suatu alasan yang sah. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil .

Diketahui bahwa proses perceraian dari awal sampai dengan akhir dilaksanakan oleh pihak pengacara penggugat Y sehingga tergugat X tidak mengikuti proses tersebut. Tergugat X tidak melaporkan adanya gugatan cerai dari pihak istri kepada pejabat berwenang.

#### Posisi Kasus 2 :

Kasus serupa tentang perceraian yang tidak memperoleh ijin dari pejabat terjadi pada tergugat dengan status PNS bernama A dengan pangkat/Gol Penata tk.I (III/d) dengan jabatan Kasi (Kepala Seksi) Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri. Tergugat A dan penggugat B telah bercerai tanpa memperoleh Surat Keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Diketahui bahwa pihak A sebagai tergugat telah bercerai dan mengetahui telah digugat cerai oleh istrinya (B) dan telah mendapatkan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebelum mendapatkan surat keterangan dari pejabat. Telah terbitnya Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 2489/AC/2011/PA.Kab.Kediri atas nama saudara A dan saat diklarifikasi kepada yang bersangkutan, ternyata proses perceraian tersebut belum

didukung dengan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang <sup>6</sup>.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah hadir namun tergugat tidak hadir. Tergugat juga tidak mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut. Tergugat juga tidak memberikan suatu alasan yang sah atas ketidak hadirannya. Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati penggugat namun tidak berhasil dan selanjutnya maka dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat<sup>7</sup>.

#### Analisis Kasus :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri diketahui bahwa proses pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraianya dilakukan Pejabat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS, maka pelaksanaan hukuman disiplin adalah melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu .

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

<sup>7</sup> Wawancara dengan sumber Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat, maka akan dibentuk Tim Pemeriksa. Pejabat pemeriksa bersifat objektif dan teliti dalam proses pemeriksaan. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Pemeriksaan sebagaimana dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksaan. PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa<sup>8</sup>. Tim Pemeriksa terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian BKD, Bagian BPKAD, atasan dari PNS yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam pemeriksaan, pejabat yang berwenang akan meminta keterangan kedua belah pihak, pihak ketiga dan meminta bukti pendukung sebagai bahan pertimbangan untuk kasus yang bersangkutan dan sebagai upaya untuk mediasi bagi kedua belah pihak. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat akan melihat latar belakang dan alasan terjadinya perceraian. Kemudian diupayakan mediasi untuk merukunkan kedua belah pihak. Apabila dari hasil keterangan dan mediasi tersebut

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

tidak berhasil maka pejabat akan memberi keputusan menerima atau menolak ijin tersebut dengan memperhatikan kelengkapan dan keabsahan dari persyaratan-persyaratan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku . Badan Kepegawaian Daerah tidak akan memproses segala permohonan (termasuk permohonan ijin perceraian) yang berkasnya tidak atau kurang sesuai dengan persyaratan. Berkas akan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan untuk dilengkapi. Apabila berkas sudah lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku maka berkas tersebut akan segera diproses<sup>9</sup>.

Badan Kepegawaian Daerah dalam pemberian ijin perceraian selalu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Belum pernah ada permohonan ijin perceraian bagi PNS di Kabupaten Kediri yang tidak mendapat ijin, karena ketika PNS tersebut berhasil dirukunkan kembali dalam proses mediasi , maka PNS yang bersangkutan mencabut permohonannya sehingga proses permohonan ijin perceraian akan diberhentikan<sup>10</sup>.

Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak tergugat yang melakukan perceraian namun tidak melaporkan adanya gugatan cerai kepada Pejabat

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

<sup>10</sup> Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

sampai dengan proses perceraian selesai dan telah mendapatkan akta cerai maka akan dijatuhi Hukuman Disiplin. Berdasarkan PP 45 Tahun 1990 Pasal 15 Ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, maka akan memperoleh akibat hukum. Akibat Hukum yang diberikan berupa salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan tindakan tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraian, maka PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1980 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun<sup>11</sup>.

3. Akibat Hukum dan Upaya dari Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus PNS yang Tidak Melaporkan Perceraian Kepada Pejabat

Dalam Pasal 30 Ayat (1) PP No.53 Tahun 2010, disebutkan bahwa PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman Disiplin yang diberikan adalah hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. Apabila terdapat PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

dahulu, maka akan dikenakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Setiap PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian maka akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat .

Dalam pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraian kepada pejabat, selanjutnya setelah diperoleh hasil akhir hukuman apakah yang dijatuhkan bagi PNS tersebut, maka akan diturunkan Surat Keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kabupaten Kediri, apabila PNS tersebut merasa kurang puas atau tidak puas atas keputusan yang diberikan dapat mengajukan keberatan . Upaya hukum dari pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraian kepada pejabat berdasarkan Pasal 1 ayat (6) PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS adalah upaya administrative berupa keberatan kepada atasan atau banding administrative

kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Upaya Banding yang dilakukan oleh PNS yang merasa tidak puas atas Putusan dari Pejabat, kecuali untuk hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat dapat dilakukan banding melalui PTUN.

## **E. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Dari penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh Penulis tentang Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang Tidak Melaporkan Perceraianya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas, antara lain :

1. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Melaporkan Perceraianya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, hukuman disiplin diberikan berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (SE BKN) Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.45 Tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak tergugat yang melakukan perceraian namun tidak melaporkan adanya gugatan cerai kepada Pejabat sampai dengan proses perceraian selesai dan telah mendapatkan akta cerai maka akan



diberikan hukuman disiplin. Pemberian hukuman disiplin dijalankan melalui proses pemeriksaan dan pemanggilan kepada pihak tergugat terlebih dahulu. setelah terbukti melakukan pelanggaran, maka pihak tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan gugatan cerai kepada Pejabat akan dijatuhi hukuman disiplin. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS akan dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2. Dalam Pasal 30 Ayat (1) PP No.53 Tahun 2010, disebutkan bahwa PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman Disiplin yang diberikan adalah hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. Apabila terdapat PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, maka akan dikenakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam pembahasan kasus tergugat berstatus PNS X dan A, maka selayaknya saudara X dan A sepantasnya dijatuhi hukuman

disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun karena tidak melaporkan perceraian nya kepada Pejabat. Upaya hukum dari pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraian nya kepada pejabat berdasarkan Pasal 1 ayat (6) PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS adalah upaya administrative berupa keberatan kepada atasan atau banding administrative kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Upaya banding pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diteruskan kepada Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN).

#### **b. Saran**

Agar pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaporkan perceraian nya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dapat berjalan dengan baik dan maksimal, maka diperlukan ketegasan dari pihak Pejabat untuk menindaklanjuti apabila terdapat PNS yang tidak melaporkan adanya proses perceraian. Perlu diberikannya penyuluhan hukum bagi setiap PNS sehingga PNS mengetahui serta memahami isi dari Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Apabila setiap PNS telah memahami isi dari peraturan tersebut sebagai pengetahuan mengenai tata cara permohonan ijin kepada pejabat sebelum melanjutkan proses perceraian pada Pengadilan, maka akan mempermudah langkah PNS dalam proses

permohonan ijin perceraian. Hal tersebut juga dapat menurunkan angka PNS yang melakukan perceraian tanpa ijin dari Pejabat dan memberikan pengetahuan atas hukuman disiplin yang akan diterima apabila melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin dari pejabat.

Selanjutnya perlu terdapat kesadaran yang tinggi khususnya bagi pihak tergugat berstatus PNS dan bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Dengan kesadaran yang tinggi dan pengetahuan tentang Peraturan Perundangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS maka PNS yang akan melakukan perceraian senantiasa menempuh upaya administrative terlebih dahulu guna mendapatkan surat keterangan pada Badan Kepegawaian sebelum melakukan perceraian pada Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Prof.Subekti, S.H, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. intermasa, Jakarta, 1978.
- , **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT.intermasa, Jakarta, 2003.
- H.M. Djamil Latif, S.H, **Aneka Hukum Perceraian di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Sastra Djatmika, S.H, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Djambatan, Jakarta Pusat, 1982.
- Prof. Ali Afandi, S.H, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata ( BW )**, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta, 2006.
- Dr. Wahyu Muljono, **Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 48 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.28 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Peraturan Bupati Kediri No.54 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara ( SE BKN ) No.48 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

#### **Situs Internet :**

Blog Badan Kepegawaian Negara, 2012, <http://www.bkn.go.id>, diakses tanggal 6 juli 2012

Blog Pengadilan Agama Kabupaten Kediri , 2012 , <http://pa-kedirikab.go.id> , diakses tanggal 10 Agustus 2012

#### **Wawancara :**

Wawancara dengan sumber Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Wawancara dengan sumber Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri